

KAJIAN PERAN DAN MOTIF: PARTAI MAHASISWA INDONESIA (PMI) DALAM PERSPEKTIF PHILANTHROPY

Sofyan Alhadar¹, Andi Yusuf Katili², Ellys Rachman³, Yayan Sahi⁴,
Umriani T. Laudengi⁵

Universitas Bina Taruna Gorontalo^{1,2,3,5}, Universitas Negeri Gorontalo⁴
alhadsof21@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com², ellysrachman12@gmail.com³
yayansahi1999@gmail.com⁴, umrianylaudengi@gmail.com⁵

ABSTRAK

Adanya sistem multi partai yang dianut oleh bangsa Indonesia, memberikan legitimasi terhadap individu dan kelompok dengan ruang terbuka berhak untuk mendirikan partai politik. Hal itu sejalan dengan prinsip hak demokrasi yang sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia yang dimana adanya penjaminan kebebasan berekspresi melalui wadah organisasi atau partai politik. Penelitian ini bertujuan menguraikan motif pendirian partai mahasiswa Indonesia, dengan menggunakan pendekatan filantropi. Dimana Philanthropy merupakan metode alat ukur perilaku manusia yang memiliki harapan dan kenyataan yang sangat besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan studi kasus menggunakan teknik analisis data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini, pendirian partai mahasiswa Indonesia di inisiasi atas dasar harapan dan kenyataan yang tidak sesuai dalam sistem pemerintahan merupakan faktor utama pendorong terbentuknya partai (PMI). Selain itu kehadiran partai ini turut dipengaruhi atas perubahan yang diinisiasi oleh kelompok yang menginginkan perubahan.

Kata Kunci: **Motif Partai PMI, Harapan dan Kenyataan, Partai Kristen Indonesia**

ABSTRACT

The existence of a multi-party system embraced by the Indonesian nation, gives legitimacy to individuals and groups with open space has the right to establish political parties. This is in line with the principle of democratic rights in accordance with the constitution of the Indonesian nation where there is a guarantee of freedom of expression through a forum for organizations or political parties. This study aims to describe the motives for the establishment of the Indonesian student party, using a philanthropic approach. Where philanthropy is a method of measuring human behavior that has great expectations and realities. The methods used in this research are qualitative and case studies use prime and secondary data analysis techniques. As a result of this research, the establishment of the Indonesian student party in the inauguration on the basis of expectations and incompatible realities in the government system is a driving factor for the formation of the party (PMI). In addition, the presence of this party was also mediated by the growth initiated by the group that wanted change.

*Keywords: **PMI Party Motives, Hope and Reality, Indonesian Christian Party***

PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik dari tahun ketahun yang mengalami peningkatan, telah menjadi sebuah hikayat sejarah yang paling fundamental dalam sistem demokrasi indonesia. Mikail, (2015) Mengemukakan dalam penelitiannya, bahwa kehadiran partai politik baru tidak lepas dari problematika pertarungan elit partai politik di zaman

kepemimpinan Abdurahman Wahid. Saat itu dia terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara 373 suara unggul dari pesaingnya megawati soekarno putri yang berasal dari partai PDIP yang hanya mendapatkan perolehan 313 suara yang disidangkan di MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Dalam pertarungan politik peristiwa ini dikenal dengan strategi “Poros Tengah” yang diinisiasi oleh partai Amanat Nasional yang diketuai oleh Amin Rais. Poros ini mendapatkan dukungan dari berbagai partai seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Keberhasilan atas terpilihnya Abdurahman Wahid sebagai presiden pada tahun 1999, menimbulkan sebuah gejala baru dalam dunia politik. Hal itu dikarenakan sikapnya yang cenderung tidak konsisten dan menjalin Kerjasama dengan Israel membuat kelompok-kelompok islam menjadi kecewa atas keputusannya. Sehingga Tanggal 23 Juli 2002 Abudrahman Wahid melalui Keputusan MPR menurunkan Abdurahman Wahid dan digantikan oleh Megawati Soekarno Putri sebagai presiden pengganti. Di zaman kepemimpinan inilah lahir sebuah peraturan yang memberikan mandat seutuhnya kepada rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung (Demokrasi). Kemunculan kebebasan dalam memilih secara langsung tentunya melahirkan sebuah Gerakan baru bagi organisasi-organisasi untuk membentuk partai politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fahmi, (2018); Sudarmo, (2016); Robbins & Judge (2015); Toha & Miftah (2002) Memiliki suatu kesimpulan yang sama bahwa, dalam kehadiran organisasi kecil yang memiliki semangat untuk membangun sebuah organisasi akan cenderung mengarah pada keinginan untuk melakukan aktivitas politik. Dari argumentasi tersebut kita dapat melihat sebuah kenyataan di lapangan, semula organisasi yang melaksanakan aktivitas kecil tiba-tiba melakukan aktivitas yang lebih besar yaitu dengan membentuk partai politik yang pola dominasi keanggotanya lebih membuka masa. Antusias kehadiran partai politik baru yang terbentuk memunculkan sebuah fenomena yang tak asing dimana meningkatnya partisipasi partai politik dalam pemilu. Perubahan sistem perpolitikan yang sebelumnya dari sistem politik otoritarian kemudian berubah menjadi sistem politik demokrasi. dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 dasar motif terbentuknya partai baru di antaranya; (1) Keinginan untuk kebebasan berekspresi; (2) Berasosiasi; (3) Kebebasan membangun pola kekuasaan. Dari tiga motif tersebut tentunya memberikan ruang terbuka bagi organisasi mana saja yang ingin membentuk partai politik. Berkaca pada pemilu 2004 dan 2009 dimana partisipasi “Partai Politik Baru” yang ikut dalam kontestasi politik di Indonesia terus mengalami kenaikan. Tercatat jumlah partai saat itu berjumlah 184

kemudian disederhanakan menjadi 48 partai. Namun pada hasil perolehan suara partai lebih didominasi oleh partai politik yang berkuasa. Sedangkan partai politik yang baru dibentuk kurang mendapatkan support. (Mikail, 2015). Pengelompokan partai politik ini tentunya tidak terlepas dimensi politik yang mempengaruhinya di antaranya;

1. Dimensi Vertikal

Pada level ini, partai politik terbentuk dengan adanya pengelompokan didasari pada Etnis, Agama, Bahasa Suku dan budaya.

2. Dimensi Horizontal

Pada level partisipasi politik dalam pemilu, artinya keikutsertaan partai dalam perhelatan pemilihan umum, mengedepankan alat ukur perhitungan untuk melihat sejauhmana elektabilitas partai dan figur.

3. Dimensi Fungsional

Yaitu dimensi yang menekankan dalam pertarungan politik fokus pada skala lokal, daerah dan pusat.

Dari ketiga dimensi tersebut, kita dapat memahami bahwa, kehadiran partai politik bukan hanya sekedar lahirnya ketidakpuasan publik atas kinerja partai dan pemimpin sebelumnya. Melainkan mulai kritisnya pemilih saat ini, hal ini memberikan legitimasi bahwa potensi kehadiran partai politik baru memiliki prospek dan capaian yang patut diperhitungkan. Peristiwa perdebatan Pro dan Kontra di kalangan Akademisi dan Politik atas perubahan partai Kristen Indonesia saat ini yang menjadi partai mahasiswa Indonesia melalui keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor M.HH-5.AH.11.01 Tahun 2022 merefleksikan peristiwa kalam pertarungan elit politik di kala itu. Bagaimana tidak, kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia (PMI) secara terbuka memiliki keinginan untuk berkompetisi dalam dunia politik yang lahir dari sebuah kekecewaan atas kinerja pemerintah saat ini. adanya potensi berbasis masa yang kuat merupakan salah satu faktor yang menjadikan partai (PMI) menjadi salah satu yang patut diperhitungkan dimasa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington dan Scott Mainwaring dalam (Romli, 2011) berkesimpulan yang sama bahwa, letak kekuatan partai politik berada pada stabilitas masa yang memiliki ideologi yang sama baik dari segi, rasa, pandangan, serta nasib yang sama untuk melakukan perubahan. Hal inilah yang dikatakan sebagai motif filantropi yang lahir dari sebuah keresahan untuk memperjuangkan kekuasaan untuk kemakmuran.

Robert L. Payton dalam (Yunarti, 2017), mengemukakan bahwa Philanthropy merupakan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok maupun organisasi yang lahir atas dasar kecintaan dan kepedulian terhadap Nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peletakan dasar hadirnya Partai Mahasiswa Indonesia atas pengganti Partai Kristen Indonesia turut dipengaruhi oleh rasa simpati dan empati oleh kalangan aktivis mahasiswa sehingga, muncul inisiatif

untuk membentuk sebuah organisasi yang sifatnya besar (Politik). Syah, (2018) berpendapat bahwa legitimasi rendahnya kepercayaan masyarakat atas kinerja elit politik saat ini, membuat mahasiswa sebagai pionir atau garda terdepan yang dapat menampung aspirasi masyarakat “Mampu mempengaruhi situasi politik yang tak kunjung stabil”. Hal itu dikarenakan mahasiswa dapat menjadi; (1) *Agen Of Change* dan; (2) *Agen Of Control*. Namun di sisi lain, kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia saat ini, bagi sebagian kalangan elit politik menjadikan partai ini sebagai ancaman. Selain itu, persepsi dilema kenetralan mahasiswa apabila berkecimpung dalam dunia politik khususnya Partai Mahasiswa menimbulkan multitafsir kepentingan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini akan mengkaji motif pendirian Partai Mahasiswa Indonesia dengan dua pendekatan yaitu; (1) Filantropi Sebagai kedermawanan (*Giving*) dalam konteks memberi ini, adalah bagaimana naluri mahasiswa mengabdikan dirinya dengan memberikan kekuatan pikiran, tenaga sampai pada konsep aktualisasi dalam partai yang mereka dirikan; (2) Filantropi Sekuler dalam konteks ini, naluri manusia/mahasiswa bergerak atas adanya respon terhadap tindakan yang kurang berpihak, sehingga menimbulkan Gerakan Baru yang peduli terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dalam penelitian ini fokus batasan masalah merujuk pada urgensi motif pendirian partai yang menggunakan rujukan teori dasar Philanthropy.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono, (2016), metode ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan secara faktual dengan menghadirkan kejadian atau fenomena aktual yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini juga, berusaha menggambarkan fenomena aktual yang terjadi di dalam dunia perpolitikan Indonesia saat ini. Adapun sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Teknik analisis data melalui wawancara terhadap 3 aktivis yang tergabung dalam partai Mahasiswa Indonesia dan 2 aktivis organisasi kemahasiswaan di Universitas Negeri Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori Motif Politik

Motif Politik merupakan dorongan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekuasaan yang diinginkan. Walgito, 2010; Beck & J. Sorauf, 1992; Situmorang, 2007 dalam (Saputra and Al-Hamdi, 2020) mengutarakan bahwa, motif merupakan sebuah pencapaian yang diinisiasi untuk mendapatkan kekuasaan yang di dalamnya terdapat:

1. Dorongan Individu dan Kelompok

Dorongan akan mempengaruhi seseorang/kelompok untuk melakukan sebuah tindakan baik itu berupa aksi, atau implementasi tindakan tertulis maupun non tertulis.

2. Kekecewaan

Kehadiran partai politik baru bisa diakibatkan dengan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dalam hal ini kelompok yang merasa dirugikan yang memiliki idealis tentang kebenaran akan berusaha menciptakan sebuah wadah untuk mereka mempersatukan idealis sebagai jembatan untuk merebut kekuasaan itu secara perlahan.

3. Adanya sebuah kesempatan dalam melakukan tindakan.

Kesempatan dalam konteks politik yang dimaksud adalah, sistem multi partai yang dianut oleh konstitusi memberikan peluang besar bagi individu atau kelompok untuk mendirikan partai-partai baru yang dianggap penting untuk kemaslahatan orang banyak.

Pada dasarnya, kemunculan partai politik baru disebabkan adanya konflik, baik itu secara internal partai politik, kekuasaan pemerintah dan lain-lain. Dalam konsep motif partai politik mahasiswa Indonesia dapat dibagi menjadi tiga:

1. Didasarkan (Material Motif)

Dimana motif ini didasarkan apa yang dikerjakan kemudian diberikan sebuah imbalan.

2. Didasarkan solidaritas dan idealisme yang sama.

Kehadiran partai politik, juga turut dipengaruhi oleh kekompakan dalam struktur sosial masyarakat yang membangun komunikasi. Terlepas dari hal itu kesamaan dalam sisi idealisme juga sangat berpengaruh terhadap pendirian partai. Sehingga korelasi antara pendirian Partai Mahasiswa Indonesia saat ini merupakan perubahan dari partai Kristen Indonesia, adalah sebuah motif yang didasarkan pada sisi idealisme yang sama. (Saputra and Al-Hamdi, 2020).

2. Konsep Peran Partai Politik Terhadap Sistem Politik di Indonesia.

Pendirian partai politik di Indonesia yang memiliki nuansa konstitusi yang multi partai, tidak luput dari sebuah proses perjalanan panjang sistem demokrasi di Indonesia. dalam konteks demokrasi yang memberikan ruang lebih kepada warga negara untuk bebas berekspresi, berkolaborasi serta memiliki kesamaan dalam tatanan sistem pemerintahan tak luput dari sejarah panjang yang kelam. Miriam Budiarjo, (2018) mengklasifikasikan perkembangan demokrasi di Indonesia terdiri atas 4 bagian di antaranya:

Fase Masa Republik Indonesia (MRI) I berlangsung pada tahun (1945-1959), dimana masa ini dikenal dengan sistem demokrasi berbasis konstitusional dimana peranan parlemen dan partai sangat menonjol dalam sistem pemerintahan.

1. Fase Masa Republik Indonesia (MRI) II (1945-1959), dalam fase ini lebih menonjolkan sistem demokrasi terpimpin, yang secara konstitusional sangat tidak relevan dan bahkan banyak hal-hal yang menyimpang dari sistem demokrasi. Dimana fase ini dikenal dengan pemerintahan tunggal yang artinya sistem kebebasan masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan sangat terbatas.
2. Fase Masa Republik Indonesia (MRI) III berlangsung sejak tahun (1965-1998). Fase ini dikenal dengan sistem demokrasi Pancasila yang sistem pemerintahannya presidensial.
3. Fase Masa Republik Indonesia (MRI) IV berlangsung sejak tahun (1998-dengan sekarang) dimana masa ini lebih menekankan pada kebebasan berdemokrasi dan menginginkan tegaknya keadilan atas perasaannya di dalam sistem pemerintahan, baik secara lokal, daerah dan pusat.

Jauh sebelum mengenal sistem demokrasi secara utuh, persepsi terhadap partai politik memiliki peranan yang sangat penting terhadap sistem pemerintahan Indonesia. oleh karena itu tidak heran apabila kebebasan berdemokrasi dijadikan sebagai alat atau wadah dalam membentuk organisasi baik kecil maupun besar (Partai Politik).

3. Pendekatan Pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia dalam Pendekatan Filantropi dan Negara Demokrasi.

Secara legal standing, partai politik memiliki peranan yang sangat penting dimana sifatnya sebagai “*central of control Government*“. Oleh karena itu esensi dari sebuah partai politik adalah wadah yang akan membentuk sisi perilaku, tindakan hingga etika dalam menciptakan pemimpin-pemimpin baru, (Hasan and Sabri, 2011). Apabila melihat pendirian Partai Mahasiswa Indonesia yang sebelumnya bernama Partai Kristen Indonesia (Perkindo 1945) adalah sebuah partai yang secara notabnya lahir dari perhimpunan masyarakat yang memiliki kesamaan dalam sisi idealisme. Mulai dari kesamaan agama, tradisi hingga tujuan dalam menciptakan suatu keteraturan yang berpihak kepada masyarakat secara terbuka. Konteks filantropi dalam menganalisis lahirnya Partai Mahasiswa Indonesia, dapat ditinjau dari dua faktor: (1) Persepsi organisasi Mahasiswa yang kurang mendapatkan perhatian; (2) Hadirnya kekecewaan atas dasar tidak berpihaknya sistem pemerintahan saat ini kepada rakyat.

Berkaitan hadirnya Partai Mahasiswa Indonesia dapat ditelaah melalui pendekatan Philanthropy yang dikonsepsikan oleh Latief, 2010; Robert Payton (1988) dalam (Arfandi, 2014) yang dimana, Philanthropy secara etimologi terbagi atas dua kata yaitu *Philio* (Cinta) dan *Antropos* (Manusia). Dimana di dalamnya terdiri atas tiga kegiatan yaitu: (1) Kegiatan Pelayanan Sosial; (2) Asosiasi Sosial; (3) Derma Sosial. Pada

hakekatnya tujuan filantropi dapat dikategorikan dengan dua perilaku yaitu: (a) Perilaku Kasih Sayang untuk bagaimana tidak mengulangi sebuah peristiwa yang merujuk pada penderitaan; (b) Perilaku menginisiasi kesejahteraan kepada masyarakat atas dasar tidak berpihaknya sistem pemerintahan.

Dalam pendekatan filantropi, kita tahu bahwa, alasan yang paling utama mahasiswa saat ini membentuk partai dari atas legal konstitusi keputusan Kementerian Hukum Dan HAM yang memberikan legal standing sah nya partai yang mereka dirikan. Apabila dilihat berdasarkan histori sejarah bahwa, Partai Kristen Indonesia merupakan partai yang sudah ada sejak kurang lebih fase masa Masa Republik Indonesia kisaran pada tahun 1945. Dalam hal pendirian partai politik hal yang sangat perlu ditekankan adalah urgensi kehadiran partai itu sendiri untuk siapa.

Partai politik merupakan bagian dari prosedural yang berkaitan dengan “titah” atau yang disebut dengan amanah. Dari partai politik itulah akan melahirkan regenerasi kader yang akan dijadikan sebagai pioneer dalam memimpin bangsa ini. Miriam Budiarmo mengemukakan bahwa partai politik merupakan alat ukur demokrasi.

4. Demokrasi Dan Hak Kebebasan Dalam Politik

Kehadiran partai politik mahasiswa Indonesia merupakan cerminan dari tatanan sistem demokrasi. Neuman dalam buku “Modern Political Parties” mengemukakan bahwa, Parpol merupakan sebuah wadah organisasi dari para aktivis yang membidik kekuasaan dalam pemerintahan serta membuat dukungan dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pembentukan partai politik merupakan amanah demokrasi yang sebenarnya. Miriam Budiarmo, (2018), mengemukakan bahwa fungsi dari demokrasi terhadap partai politik adalah:

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik.

Korelasi demokrasi dengan komunikasi politik adalah sebagai sarana memperkuat kekuatan ideologi.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diidentikkan dengan proses yang memiliki orientasi perubahan terhadap fenomena politik itu sendiri.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.

Rekrutmen politik merujuk pada keterbukaan kesempatan yang sama bagi rakyat yang memiliki profesi yang berbeda mulai dari buru, petani, guru, pejabat dan lain-lain. Hadirnya sebagai sarana rekrutmen membuka peluang tentang hakikat demokrasi bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pendirian Partai Mahasiswa Indonesia saat ini, sebenarnya adalah hal yang positif apabila tujuan dan ideologi yang ditanamkan kepada kader mereka mengenai konsep kemajuan bangsa Indonesia.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik.

Prinsip dari kehadiran partai politik merupakan alat atau “*sistem control government*”. Oleh karena itu demokrasi akan sangat terbantu dengan hadirnya partai politik yang tidak menyimpang dari konstitusi. Sehingga berdasarkan penjabaran di atas, dapat dimaknai bahwa, demokrasi sangat menjamin adanya kehadiran partai politik selama partai itu sesuai dengan koridor konstitusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia merupakan perubahan dari Partai Kristen Indonesia yang secara hukum memiliki legalitas. Dan dalam hal ini, secara garis besar, kehadiran ini juga turut dipengaruhi oleh kepentingan para elit politik yang ingin mendapatkan kekuasaan. dengan adanya potensi inisiatif yang cenderung idealisme yang tinggi dengan basis masa yang besar, maka Partai Mahasiswa Indonesia akan berpotensi menjadi partai yang diunggulkan dalam perhelatan politik di masa depan. Selain itu, kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia merupakan *Agen Of Control* bagi sistem pemerintahan di Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi, H. (2020) ‘Motif dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah’, *Jurnal Muhammadiyah Studies*, 1(1), pp. 127–155. doi: 10.22219/jms.v1i1.11413
- Fahmi. (2018). *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- Gitosudarmo, & Sudita. (2016). *Perilaku keorganisasian*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hasan, H. and Sabri (2011) ‘Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011’, 2(2), pp. 571–581.
- Mikail, K. (2015). Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia:Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019. *Tamaddun*, XV, 108-146.
- Budiarjo, M. (2018) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 4th edn. Edited by IKAPI. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, & Judge. (2015). *Perilaku organisasi, organization behavior*. Salemba Empat.
- Romli, L. (2011). Reformasi Partai Politik Dan Sistem. *Politica*, 2, 199-2019.
- Saputra, A. A. and Al-Hamdi, R. (2020) ‘Motif Politik dalam Kelahiran dan Pembentukan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi)’, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), pp. 163–182. doi: 10.14710/politika.11.2.2020.163-182.
- Sugiono, P. D. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*
- Syah, A. M. (2018, April). Mahasiswa Dan Partai Politik (Studi Tentang Peran Mahasiswa Gemasaba Terhadap DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur). *Skripsi*, pp. 1-104.
- Toha, & Miftah. (2002). *Perspektif perilaku birokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yunarti, I. (2017). CSR: Antara Strategi Promosi Public Relations (Pr) dan. *Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan* (Pp. 158-166). Bandar Lampung: Fisip Universitas Bandar Lampung.